

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Hal ini dimulai dari tahun 2015.<sup>1</sup>

Diperkuat dengan dukungan materil berupa pengelolaan dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN sejak tahun 2015 yang menelan anggaran tidak kurang dari Rp. 20,76 triliun pada tahun tersebut dengan penyerapan mencapai 82% sampai akhir tahun dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Melalui undang-undang tersebut, posisi desa dalam pembangunan tidak lagi sebatas obyek, melainkan menjadi subyek/pelaksana program pembangunan dari pemerintah. Dengan demikian, desa ke depan akan menjadi penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat secara penuh dan mandiri.

Melalui UU No. 6 tahun 2014 tentang desa tersebut, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

---

<sup>1</sup>Elin Dwi Sintia, "Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam" (skripsi; Fakultas ekonomi dan bisnis islam: Lampung, 2019), h. 3-4

masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentu disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Adapun tujuan diluncurkannya program dana desa antara lain memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Karena desa merupakan satuan terkecil dalam pemerintahan, maka pembangunan harus dimulai dari sini. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa sebagai pelaksana program dana desa diharapkan secara intensif melaksanakan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi. Pembangunan fisik diwujudkan dalam penyediaan sarana dan pra sarana desa, sedangkan pembangunan ekonomi diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat.

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah Efektivitas Program Kesehatan Masyarakat dengan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, terutama dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat Desa Bojo1 sebagai sasaran utama dalam program tersebut. Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa jumlah dana yang dialokasikan dalam program dana desa sangat besar, sehingga membutuhkan penanganan serius agar program-program yang dilaksanakan memiliki efektivitas yang tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Maka untuk mengetahui tingkat efektivitas tersebut, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian secara mendalam sehingga didapatkan data akurat mengenai program-program yang telah dijalankan.

Efektivitas merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah program, karena ukuran keberhasilan dari sebuah program dapat dinilai dari tingkat efektivitasnya. Dalam mengukur tingkat efektivitas, dapat dilihat dari seberapa jauh pencapaian hasil (*output*) dari tujuan yang telah direncanakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis bahwa ukuran efektivitas

dapat dilihat melalui pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian terdapat pada output.<sup>2</sup> Dalam hal ini, pengukuran efektivitas program kesehatan masyarakat diukur melalui *output* yang dihasilkan apakah dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Menurut WHO kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat.<sup>3</sup> Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada paradigma sehat, yakni paradigma yang mengutamakan upaya promotif-preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif-rehabilitatif. Selanjutnya, peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional, mengamanatkan bahwa pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional atau SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat.<sup>4</sup>

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat merupakan suatu proses aktif, dimana sasaran masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif /berpartisipasi dalam kegiatan dan program kesehatan. Ditinjau dari konteks pembangunan kesehatan, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator (pemerintah atau LSM) dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian fasilitator (pemerintah atau LSM) dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kegiatan dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat.

Kesehatan merupakan investasi yang perlu dihargai, dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap manusia dimana kesehatan menjadi salah satu faktor penentu IPM (Indeks pembangunan manusia) selain faktor ekonomi dan pendidikan. Semua orang pasti membutuhkan

---

<sup>2</sup>Hari Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 2007), h. 55

<sup>3</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi kesehatan teori dan aplikasi*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010), h. 2

<sup>4</sup>R. Hapsara HR. DPH., *Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016 ), h. 12

kesehatan, baik kesehatan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif dan meningkatkan kesejahteraannya.

Kesehatan juga perlu diperjuangkan, diupayakan, ditingkatkan oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat karena sehat itu penting, di mana setiap manusia adalah makhluk hidup ciptaan tuhan yang paling sempurna. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu keistimewaan yang menonjol adalah akal dan perilakunya, meskipun semua makhluk hidup mempunyai perilaku beda halnya dengan perilaku manusia.<sup>5</sup> Berdasarkan dengan keputusan sistem kesehatan nasional (SKN).

Permasalahan kesehatan juga cukup menjadi perhatian pemerintah pada Desa Bojo 1 Kecamatan Malusetasi Kabupaen Barru, dimana ditemukan ada berbagai aspek kesehatan yang perlu dibenahi. sebagaimana disampaikan oleh pemerintah Desa Bojo 1 dalam wawancara awal mengenai permasalahan kesehatan, ia menyatakan bahwa:

“Disini ada berbagai aspek kesehatan yang perlu ditingkatkan yaitu aspek lingkungan, aspek kesehatan masyarakat yang mencakup kesehatan balita, lansia dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. maka dari itu dibentuk berbagai program yang di harapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut.”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemerintah Desa Bojo 1 melihat adanya permasalahan kesehatan pada masyarakat balita, lansia, pasangan suami istri dalam hal ini urusan reproduksi dan permasalahan kesehatan lingkungan atau kesbersihan lingkungan. Maka dari itu dijelaskan bahwa pemerintah mengupayakan pengadaan program untuk mengatasi masalah tersebut yang mencakup adanya pengalokasian dana dalam hal ini pemanfaatan dana desa untuk mengadakan program. Dari hal tersebut, cukup menarik untuk dilihat bahwa pemanfaatan dana desa berperan penting dalam peningkatan mutu kesehatan masyarakat. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji proses pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bojo 1 dalam program kesehatan masyarakat.

---

<sup>5</sup>Uswatun Hasanah, “Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dalam Perubahan Perilaku Budaya Bersih Melalui Program Jambanisasi Di Desa Sinar Ogan Tanjung Bintang” (Skripsi; Fakultas Dakwah Dan Komunikasi; Lampung, 2019), h. 5

<sup>6</sup> Awaluddin, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bojo 1, Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2020

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti dan membahas permasalahan yang menyangkut program kesehatan masyarakat menjadi sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Program Kesehatan Masyarakat dengan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan program kesehatan masyarakat di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana pemanfaatan dana desa pada program kesehatan masyarakat di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ?
3. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap pelaksanaan program kesehatan masyarakat di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui bentuk pelaksanaan program kesehatan masyarakat di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Mengetahui pemanfaatan dana desa pada program kesehatan masyarakat di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
3. Mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap pelaksanaan program kesehatan masyarakat di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian program kesehatan masyarakat, serta dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai Efektivitas Program Kesehatan Masyarakat dengan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi adik-adik angkatan prodi Pengembangan Masyarakat Islam serta dapat memberikan kontribusi moril mengenai program kesehatan masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menjadi bahan studi dan evaluasi dalam menentukan program-program di masa mendatang.

